

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PEMERKOSAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS)**



**OLEH  
AHMAD FADHLULLAH**

**B 111 11 021**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DISERTAI DENGAN PEMERKOSAAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**AHMAD FADHLULLAH**

**B 111 11 021**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD FADHLULLAH**

**B 111 11 021**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 21 Agustus 2015  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**


**Ketua**



**Prof.Dr. H.M. Said Karim,S.H.,M.H.,M.Si.**

NIP.19620711 198703 1 001

**Sekretaris**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**

NIP. 19631024 198903 1 002

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**

NIP. 1961 0607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : AHMAD FADHLULLAH

Nomor Pokok : B 111 11 021

Bagian : Hukum Pidana

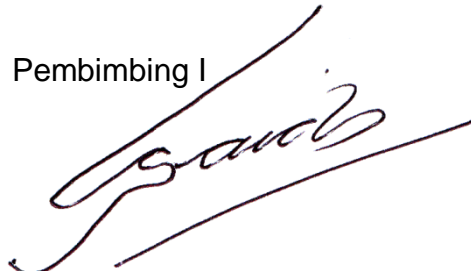
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DISERTAI DENGAN PEMERKOSAAN

(Studi Kasus Putusan No. 78/PID.B/2014/ PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2015

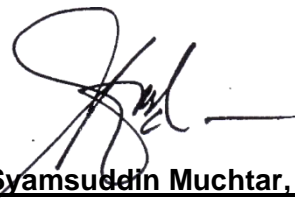
Pembimbing I



Prof.Dr. H.M. Said Karim,S.H.,M.H.,M.Si.

NIP.19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **AHMAD FADHLULLAH**  
Nomor Pokok : B 111 11 021  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DISERTAI DENGAN PEMERKOSAAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 78/PID.B/2014/ PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Agustus 2015

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1003

## **ABSTRAK**

**AHMAD FADHLULLAH (B111 11 021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PEMERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PID.B/2014/PN.MKS)** Dibawah bimbingan **H.M. Said Karim** sebagai Pembimbing I dan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS telah sesuai dengan fakta hukum baik keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS sudah tepat, yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana seumur hidup juga dinilai sudah tepat jika dilihat dari perbuatan pelaku yang dinilai sangat sadistik dan tidak berperikemanusiaan.

## **ABSTRACT**

**AHMAD FADHLULLAH (B111 11 021) JUDICIAL REVIEW OF THE MERGER OF THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER ACCOMPANIED BY RAPE (CASE STUDY PUTUSAN NOMOR: 78/PID.B/2014/PN.MKS)** Under the guidance of **H.M Said Karim** as a Supervisor I and **Syamsuddin Muchtar** as Supervisor II.

This study aims to determine the application of substantive criminal law against the crime of premeditated murder accompanied by rape and to determine the consideration of the judges of the criminal offense of premeditated murder with rape in Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS.

This research was conducted in the District Court of Makassar. The study was conducted by collecting primary data and secondary data then analyzed and processed using a qualitative approach which is then presented in a descriptive form.

The results showed that the application of substantive criminal law against the crime of premeditated murder accompanied by rape Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS accordance with good legal fact witness testimony, evidence, and testimony from the accused. Consideration of judges on criminal acts of premeditated murder with rape in Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS had been right, namely the fulfillment of all the elements in the indictment that charges the primary One Pasal 340 KUHP and Pasal 285 of KUHP Both charges, as well as information witness the mutual accords plus the judge's conviction. In addition the judge in imposing criminal sanctions in the form of life imprisonment is also considered appropriate if viewed from the perpetrator acts considered to be very sadistic and inhumanity.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyajikan dalam bentuk skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan Studi Kasus Putusan No.78/PID.B/2014/PN.MKS” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini penulis menghadapi berbagai kendala, rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan maupun dorongan motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof.Dr.H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing penulis.

penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda tercinta **Dr.H. Nukman, M.A.**, dan Ibunda **Hj. Ernawati** yang selama ini memberikan dorongan motivasi, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan moral dan materil yang begitu besar dalam



membesarkan penulis hingga dapat menjadi seperti sekarang ini, penulis menyampaikan hormat dan terima kasih yang paling dalam dari lubuk hati. Juga saudara penulis yakni, Masnaneni Awaliah dan Abdillah Mubarak yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Faridha Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak H.M. Imran Arief S.H., M.H. selaku penguji I, Bapak Prof.Dr.Muahadar S.H., M.H. selaku penguji II, dan Bapak Prof.Dr.H. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku penguji III dalam ujian usulan proposal dan skripsi penulis.
5. Para Bapak dan Ibu dosen serta segenap pegawai dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof.Dr.H. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis, serta Bapak Azis, S.H., M.H., dan Andi

Naharuddin, S.Ip., M.Si., selaku supervisor KKN Reguler Kecamatan Ulaweng Kab. Bone.

7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar beserta staf administrasi, terkhusus Bapak Suparman Nyompa, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Segenap Keluarga Besar yang tercinta HASANUDDIN LAW STUDY CENTRE Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Para sahabat, kekasih, dan teman-teman yang selalu mendukung dan menemaniku dikala susah maupun senang, terkhusus untuk Lia Ristianti Putri S.H, Ahmad Akbar S.H., Andi Batari Anindhita S.H., Dwi Arianto Rukmana S.H., I Gde Liananda, Ashar Raider Pratama, Azwardin Marzuki, Andi Nur Oktaria, Surya Eka Nento, Zulfikram Nur, Don Viko, Rahman Anugerah, Fadhil Nugraha, Wahyudi Ashari, Yaumil Azis, dan Fahmi Fahrian.
10. Segenap Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2014/2015 dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2014/2015.
11. Keluarga Besar MEDIASI Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Teman-teman KKN Reguler Angkatan 87 Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Terima Kasih.

Penulis

AHMAD FADHLULLAH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana .....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
B. Tindak Pidana Pembunuhan .....	15
1. Pengertian Pembunuhan .....	15
2. Unsur-unsur tindak Pidana Pembunhan.....	17
3. Pembunuhan Berencana .....	18
C. Tindak Pidana Pemerkosaan .....	20
1. Pengertian Pemerkosaan .....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan .....	22
D. Tinjauan Umum Perbarengan ( <i>Concursus</i> ) .....	23
1. Pengertian <i>Concursus</i> .....	23
2. Jenis-jensi <i>Concursus</i> .....	24
E. Sistem Pidanaaan .....	29
1. Jenis-Jenis Pidanaaan .....	29
2. Sistem Pidanaaan Concursus .....	30

F. Dasar Pertimbangan Hakim.....	32
1. Dasar Pemberatan Pidana .....	32
2. Dasar Peringatan Pidana .....	34

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis Sumber Data .....	36
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	37
D. Analisis Data .....	38

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Pemeriksaan.....	39
1. Identitas Terdakwa .....	39
2. Posisi Kasus .....	39
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	42
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	51
5. Amar Putusan .....	53
6. Analisa Penulis .....	54
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pemeriksaan disertai dengan Pembunuhan Berencana.....	59
1. Pertimbangan Hukum Hakim .....	59
2. Analisa Penulis .....	61

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat berdasarkan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 landasan konstitusi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) tertuang “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti Indonesia tidak menjadikan kekuasaan otoriter sebagai landasan primer dalam menjalankan negara, melainkan menjadikan hukum sebagai pilar utama kekuasaan negara. Dalam ideologi negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menjadikan hukum bersifat mengikat untuk setiap warga negara Indonesia.

Hukum memiliki tujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. L.J. van Apeldoorn mengartikan kata damai (*vrede*) sebagai perilaku tertib hukum sehingga segala bentuk kejahatan berarti melanggar perdamaian (*vredebreuk*)<sup>1</sup>. Perdamaian sendiri diartikan sebagai jaminan

---

<sup>1</sup> L.J. van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm

keamanan kepada setiap umat manusia dalam keberlangsungan hidupnya. Dalam mempertahankan perdamaian, hukum secara universal dituntut melindungi kepentingan-kepentingan manusia terhadap hal-hal tertentu, seperti perlindungan hukum terhadap keamanan serta kenyamanan diri dan nyawa seseorang.

Dalam pelaksanaan negara, hukum harus memenuhi fungsinya dalam menjalankan kekuasaan negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negara termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum pidana sangat penting dalam melindungi masyarakat.

Berbagai tindak pidana terjadi dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu hukum pidana hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dari berbagai jenis kejahatan sesuai yang diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta berbagai perundang-undangan yang berlaku.

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”<sup>2</sup>. Dalam hukum pidana, peristiwa yang terjadi dimana unsur-unsurnya mencocoki syarat atau rumusan delik sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga layak dikenakan sanksi pidana disebut dengan Tindak pidana. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersedia tunduk kepada peraturan hukum pidana yang berlaku sehingga timbul perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

Pembunuhan adalah perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Secara yuridis, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara untuk pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan

---

<sup>2</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, Jakarta, hlm. 9.



ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Walaupun sanksi pidana tindak pidana pembunuhan sedemikian beratnya, masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai modus dan tujuannya masing-masing.

Manusia sebagai makhluk individu hidup dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing dan terkadang dalam memenuhinya menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Berbagai kepentingan masyarakat yang saling bertentangan menjadi faktor utama terjadinya perselisihan yang berujung dengan konflik. Pertentangan tersebut menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial, dendam, hingga mempengaruhi kondisi psikologis dan seringkali berujung dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Bahkan, tidak sedikit tindak pidana pembunuhan yang terjadi disertai dengan kasus pemerkosaan. Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dimana perbuatan ini terjadi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Banyak jalan terjadinya pemerkosaan, ada yang melakukannya karena ada niat terlebih dahulu adapula yang melakukannya karena adanya kesempatan yang tersedia. Kasus pemerkosaan yang marak terjadi dikarenakan si pelaku dan korban yang telah berkenalan lama serta adanya hasrat seksual terpendam si pelaku yang tidak terlampiaskan

kepada korban sehingga tidak jarang hasrat tersebut dilampiaskan dengan adanya unsur pemaksaan.

Tindak pidana pemerkosaan terjadi karena adanya perlawanan dari korban untuk menolak permintaan si pelaku dikarenakan tidak adanya hasrat seksual korban untuk melakukan persetubuhan serta upaya perlawanan dari wanita yang ingin menjaga keperawanannya. Si pelaku seringkali memberikan ancaman kekerasan bahkan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya dan tidak sedikit yang berakhir dengan hilangnya nyawa korban.

Berbagai kasus-kasus tindak pidana yang berlanjut menimbulkan berbagai pertanyaan ditengah-tengah masyarakat mengenai penjatuhan hukuman bagi pelakunya. Peran hakim sangat penting dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana hadirnya hukum untuk memberikan pembalasan dan pelajaran sebagai bentuk efek jera demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Oleh karena hal tersebut diatas, penulis ingin memberikan hasil pemikirannya melalui analisis kasus dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan” (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?
2. Bagaiamanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari Permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai Pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai Pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana istilah tindak pidana lebih sering dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang terdiri dari 3 suku kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>3</sup>. Maka dari penerjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana.

Dalam bukunya, Amir Ilyas mengartikan istilah *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm: 69

<sup>4</sup> Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta. hlm: 19.

*Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe dalam buku karya E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, sebagai<sup>5</sup>:

“Suatu pelanggaran kaidah (pengganggu ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah<sup>6</sup>:

“Suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Selain itu beberapa sarjana hukum barat yang megartikan istilah *strfbaarfeit*, antara lain Simon yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab<sup>7</sup>.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* (tindak pidana) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat

---

<sup>5</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 205.

<sup>6</sup> Ibid, hlm.205

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm: 98.

dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana<sup>8</sup>.

Berbagai pendapat ahli mendefinisikan mengenai *strafbaarfeit* dengan istilah delik, antara lain Zainal Abidin Farid yang mengartikan *strafbaarfeit* dengan kata delik dengan alasan bahwa istilah yang paling tepat karena dianggap lebih singkat efisien dan bersifat universal. Sedangkan Moelijanto beralasan menggunakan istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum<sup>9</sup>.

Untuk itu Amir Ilyas dalam bukunya mengelompokkan kedalam 5 kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum, sebagai berikut<sup>10</sup>:

Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainya;

Ke-2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moejanto (1983 : 54) dan lain-lain; Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J. Van Schravendijk (Sianturi 1986 : 206) dan lain-lain;

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjokoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT, Rafika Aditama. Bandung, Hlm:49

<sup>9</sup> Moeljatno, 1984, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 56.

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta. hlm: 21.

Ke-4 : “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986 : 55), Soesilo (1979 :26) dan S.R Sianturi (1986 : 204) dan lain-lain;

Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun : 74) dan lain-lain.

Penulis dalam hal ini menggunakan istilah “tindak pidana” seperti yang kurang lebih 20 tahun digunakan oleh Wirjono Projodikoro karena dianggap lebih efektif dan tegas dalam menyatakan suatu peristiwa pidana. Kata “tindak pidana” juga lebih awam jika dibanding dengan redaksi kata “delik” yang digunakan Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara. Menurut Amir Ilyas untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya<sup>11</sup>.

Lebih lanjut, dari berbagai pendapat-pendapat ahli diatas mengenai tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari definisi tersebut perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Mengenai dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 24

“Asas *Legalitas*”. Dalam prinsip *asas legalitas* tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila belum diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Dalam hukum belanda *asas legalitas* dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege* seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP<sup>12</sup>:

“sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya”.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *asas legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni<sup>13</sup>:

- 1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- 2) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- 3) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;

---

<sup>12</sup> L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.336.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.13.



## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari istilah *strafbaarfeit* yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa untuk mengetahui suatu tindak pidana, pada umumnya perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam perundang-undangan tersebut, terdapat syarat-syarat tertentu yang mengatur tentang perbuatan itu sehingga dengan jelas membedakannya dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan mengenai subjek yang menjadikan manusia sebagai oknum dari suatu tindak pidana dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi status dari kualifikasi seorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barangsiapa”, atau seseorang dari golongan tertentu<sup>14</sup>. Penentuan kualifikasi subjek dalam unsur tindak pidana ini sangat penting mengingat penetapan jenis pidana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki si pelaku.

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam berbagai kepustakaan hukum pidana

---

<sup>14</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 209.

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri ataupun yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan<sup>15</sup>.

Selain dari sudut pandang subjektif dan objektif tersebut, beberapa sarjana hukum mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain Loebby Luqman yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi<sup>16</sup>:

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.45.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.47.

Dalam pandangan Moeljatno, suatu tindak pidana harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Untuk itu, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana meliputi<sup>17</sup>:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu melawan dengan hukum;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada seipembuat.

Dari kedua pendapat ahli tersebut, Loebby Luqman dan Moeljatno memiliki kesamaan pendapat yang cukup signifikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Loebby Luqman dan Moeljanto merumuskan unsur tindak pidana sebagai subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum yang patut dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam bukunya, EY.Kanter dan S.R. Sianturi secara ringkas menyusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu<sup>18</sup>:

- 1) Subjek

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.48.

<sup>18</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 211.

- 2) Kesalahan
- 3) Tindakan tersebut bersifat melwan hukum
- 4) Suatu tindkan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan keadaan

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memasukkan waktu, tempat, dan keadaan sebagaimana unsur objektif yang dikemukakan sebelumnya.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Tindak Pidana Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, tindak pidana ini melihat terpenuhinya akibat yang dilarang atau yang tidak dikhendaki undang-undang untuk dapat dikatakan selesainya delik ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri

dari 13 pasal, yakni dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

Beberapa sarjana hukum juga memasukkan pasal lain sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa. Dalam bukunya Adami Chazawi mengelompokkan kejahatan terhadap nyawa atas dasar kesalahannya dalam 2 kelompok, antara lain<sup>19</sup>:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab-XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab-XXI (Khusus Pasal 359).

Dari pengelompokan tersebut, yang disebut sebagai tindak pidana pembunuhan terdapat pada kelompok kejahatan yang pertama. Pada pengelompokan itu harus ada unsur kesengajaan dalam rangkaian tindakan tersebut dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>19</sup> Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.55.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pada unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Loebby Luqman dan Moeljatno sebelumnya bahwa garis besar unsur-unsur tindak pidana adalah subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut undang-undang yang patut dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan seperti yang dirumuskan oleh Adam Chazawi terdiri dari<sup>20</sup>:

- a. Unsur Obyektif
  - 1) Perbuatan: Menghilangkan nyawa;
  - 2) Obyeknya: nyawa orang lain
- b. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Sedangkan Lamintang dalam bukunya menyebut pembunuhan dengan istilah Belanda *doodslag*, dengan unsur-unsur sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Unsur subjektif: *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur Objektif: 1. *Beroven* atau menghilangkan  
2. *het leven* atau nyawa

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.57.

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28.

### 3. *een lander* atau orang lain.

Dalam pelaksanaannya, tenggang waktu antara kehendak (niat) untuk melakukan dengan pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak terlalu lama disebut tindak pidana pembunuhan biasa. Sedangkan apabila terdapat tenggat waktu yang lama antara kehendak (niat) dengan pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sehingga ada potensi untuk berpikir berbagai hal dalam melakukan pembunuhan, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana.

### 3. Pembunuhan Berencana

Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belanda disebut *moord*. Pembunuhan berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsur-unsur pada Pasal 338 dan 339 KUHP dengan tambahan unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana sejatinya diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah<sup>22</sup>:

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena

---

<sup>22</sup> Moeljatno, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.123.

pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Dari isi Pasal 340 KUHP diatas mengenai tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, telah dirumuskan oleh Lamintang mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, antara lain<sup>23</sup>:

- a. Unsur subjektif: 1. *opzetelijk* atau dengan sengaja  
2. *voorbedachte raad* atau direncanakan dulu
- b. Unsur Objektif: 1. *Beroven* atau menghilangkan  
2. *het leven* atau nyawa  
3. *een lander* atau orang lain.

Terdapat penambahan unsur direncanakan terlebih dahulu dari unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Lamintang sebelumnya. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak (niat) dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana.

Namun menurut Wirjono Prodjodikoro, untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.52.



merencanakan dan waktu melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Ini semua bergantung pada keadaan konkret dari setiap peristiwa<sup>24</sup>.

## **C. Tindak Pidana Pemerkosaan**

### **1. Pengertian Pemerkosaan**

Pemerkosaan atau dalam bahasa belanda disebut *verkrachting* merupakan kejahatan terhadap kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) sebagaimana perbuatan-perbuatan yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Kejahatan terhadap kesusilaan ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan itu dan tanpa kemauan yang dikhendaki seseorang.

Secara yuridis, Pasal ini diatur kedalam Pasal 285 KUHP dengan rumusan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh dengan ancaman pidana 12 (dua belas) tahun. Mirip dengan tindak pidana ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan rumusan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengan hukuman pidana 9 (sembilan)

---

<sup>24</sup> Wirjono Prdjodikoro, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.70.

tahun penjara. Namun Wirjono Prodjodikoro membedakan kedua tindak Pasal tersebut, sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
- b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan didalam perkawinan sehingga tidak bisa seorang suami memaksa isterinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.

Diluar daripada yang telah disebutkan diatas, makna cabul lebih luas daripada pemerkosaan untuk bersetubuh. Makna cabul bisa saja terjadi dengan tindakan berbau seksual tanpa adanya pesetubuhan, sedangkan tindak pidana pemerkosaan hanya dapat terjadi jika adanya perbuatan persetubuhan oleh pelaku.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.118

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Penggunaan unsur kesengajaan Pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 285. Isi dari Pasal tersebut berbunyi<sup>26</sup>:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari isi Pasal tersebut, Andi Hamzah merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut<sup>27</sup>:

- 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) Memaksa;
- 3) Dengan perempuan yang bukan istrinya;
- 4) Terjadi persetubuhan.

R. Soesilo juga mengatakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya. Dari Pasal 285 ini juga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut<sup>28</sup>:

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.105.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sindar Grafika, Jakarta, hlm.15.

<sup>28</sup> Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy* Dalam penanggulangan kejahatan kekerasan, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 43.

- c. Korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur;
- d. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak Korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

Sekilas tindak pidana pemerkosaan ini memiliki unsur yang sama dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiyaan. Untuk itu Pasal ini tidak berlaku bagi pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri sebagai sebagai Korban, sebab tindak pidana pemerkosaan hanya dapat terjadi terhadap perempuan yang bukan istrinya sebagai Korban. Dengan merumuskan hal itu, Pasal 285 KUHP telah menyatakan bahwa perempuan yang telah terikat perkawinan tidak lagi memiliki hakekat kemanusiaan untuk melakukan persetujuan persetubuhan, atau tidak perlu lagi dimintai persetujuannya<sup>29</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Perbarengan (*Concursus*)**

##### **1. Pengertian *Concursus***

Perbarengan merupakan terjemahan dari istilah *Concursus* atau *samenloop*. Perbarengan terdapat pada BAB-VI Buku I KUHP yang memuat aturan tentang beberapa tindak pidana yang

---

<sup>29</sup> Sulistyowati Irianto, 2006, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.58.

dilakukan oleh satu orang atau biasa disebut “Gabungan Tindak Pidana”.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Perbarengan Tindak Pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim<sup>30</sup>. Apabila diantara kedua tindak pidana yang dilakukan tersebut disela oleh putusan hakim dengan penjatuhan sanksi pidana , maka tindakan tersebut tidak dikatakan sebagai perbarengan melainkan disebut sebagai *residive*.

## 2. Jenis-Jenis *Concursus*

Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya membagi gabungan tindak pidana menjadi tiga macam jenis, yaitu<sup>31</sup>:

- 1) *Concursus Idealis*: Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan” (*eendaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- 2) *Perbuatan berlanjut*: Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau yang masing-masing merupakan tindak

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

<sup>31</sup> Wirdjono Prodjokoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hlm.49.

pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgesette handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHP.

- 3) Concursus Realis: Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dalam berbagai kepustakaan hukum pidana, concursus atau samenloop juga dibedakan atas tiga jenis yakni:

a. *Concursus Idealis*

Concursus idealis dikatakan sebagai perbarengan tunggal karena dalam satu tindakan tunggal terjadi dua atau lebih tindak pidana, dengan kata lain dengan tindakan yang sama telah juga terjadi tindak pidana yang lain<sup>32</sup>.

Penjatuhan hukuman pidana pada concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP, dengan rumusan:

- 1) Apabila tindakan tersebut masuk kedalam lebih dari satu ketentuan pidana pokok, maka yang diterapkan adalah ketentuan pidana pokok yang terberat.
- 2) Apabila tindakan tersebut masuk kedalam ketentuan umum dan juga masuk kedalam ketentuan pidana

---

<sup>32</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm.393.

husus, maka hanya ketentuan pidana khusus yang diterapkan.

#### *b. Perbuatan Berlanjut*

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindakan dimana tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut<sup>33</sup>.

Kemudian Dalam Mvt (Memorie van toelichting), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai suatu perwujudan dari suatu kehendak jahat (*one criminal intention*)
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis.
- 3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama

Sistem pemberian sanksi pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem *absorbsi*. Pemberian sanksi pidananya

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas, et.al, 2012, Asas-asas Hukum Pidana II. Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta. hlm: 109.

yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana yang terberat, dan jika berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok terberat.

*c. Concursus Realis*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa jenis tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang sejenis tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu khendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam<sup>34</sup>.

Walaupun dalam concursus realis setiap tindak pidana harus berdiri masing-masing, namun sistem pemidanaan terhadap pidana pokok dalam concursus realis yang sejenis hanya boleh dijatuhkan satu pidana saja.

Selain itu dari rumusan Pasal mengenai concursus realis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu:

- a. Kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya bisa dikenakan satu pidana dengan

---

<sup>34</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm.400.



ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

- b. Kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.
- c. Jika berupa pelanggaran, maka jumlah seluruh pidana yang diancamkan dikumulasi. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan.
- d. Jika berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) KUHP (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan) dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Untuk *concurus realis*, baik kejahatan maupun, pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71.

## **E. Sistem Pemidanaan**

### **1. Jenis-Jenis Pemidanaan**

Pemidanaan adalah tahap penjatuhan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Penjatuhan hukuman pidana kepada seorang pelaku kejahatan tidak bermaksud buruk kepada si pelaku, tetapi untuk kebaikan si pelaku, Korban, dan masyarakat untuk restorasi lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan.

Sistem pemidanaan diatur dalam BAB II Buku ke 1 KUHP dari pasal 10 samapi Pasal 43, yang kemudian jugadiatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

- 2) Reglemene Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77;
- 3) Ordonansi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749)
- 4) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741)
- 5) UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah merinci jenis-jenis pidana. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, antara lain<sup>35</sup>:

- 1) Pidana Pokok yang terdiri dari

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 25.

- a. Pidana mati
- b. Pidanan penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946), dan

2) Pidana tambahan yang terdiri dari:

- b. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- c. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- d. Pidana pengumuman keputusan.

Adapun penjatuhan sistem pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Apabila pidana pokok telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan huku tetap (*in kracht van gewisdezaak*), maka diperlukan suatu tindakan pelaksanaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) penjatuhan pidana pokok tidak dibenarkan dengan penjatuhan hukuman secara kumulasi.

### 3. Sistem Pemidanaan Concursum

Dalam penjatuhan pidana concursum, Amir Ilyas dalam bukunya membagi *stelsel* atau sistem pemidaan kedalam empat *stelses* dalam kasus perbarengan<sup>36</sup>:

---

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.112.

- 6) *Stelsel absorpsi*: ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, dan dalam hal ini yang paling berat saja diterapkan, ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.
- 7) *Stelsel absorpsi yang diperberat*: berlaku bagi *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*) yang tercantum dalam pasal 65 KUHP.
- 8) *Stelsel Kumulasi*: untuk tiap tindak pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlahkan dan diolah menjadi satu hukuman pidana.
- 9) *Stelsel kumulasi terbatas*: dalam hal ini dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh melampaui maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan persentase tertentu.

Dari stelsel yang dikemukakan diatas, sistem penjatuhan hukuman pada *concursum idealis* dan *perbuatan berlanjut* sama yakni *stelsel absorpsi*. Penjatuhan hukuman pidana pada *stelsel absorpsi* hanya diberikan yang aturannya menjatuhkan sanksi pidana terberat dari beberapa sanksi atas tindak pidana yang dilakukan.

## **F. Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Dasar Pemberatan Pidana**

Menurut Jonkers, bahwa dasar umum, strafverhogingsgronden, atau dasar pemberatan atau dasar penambahan pidana umum adalah<sup>37</sup>:

- 1) Kedudukan sebagai pegawai negeri
- 2) Recidive (Pengulangan delik)
- 3) Samenloop (Gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana.

Namun kedudukan sebagai pegawai negeri sangat jarang digunakan dikarenakan sulitnya untuk membuktikan unsur dari poin pertama, dikarenakan dalam Pasal 52 KUHP diharuskan adanya unsur kapasitas kewenangan atas jabatannya dalam melakukan tindak pidana.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, ketentuan mengenai penjatuhan hukuman pidana pada berbagai tindak pidana, *concurus/samenloop* bukan merupakan dasar menambah pidana, walaupun pada Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP ditentukan bahwa jumlah pidana adalah pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya.

---

<sup>37</sup> Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm.437.

Penjatuhan hukuman dengan sistem kumulatif murni hanya diatur dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan antara kejahatan. Namun hal ini tidak berlaku bagi tindak pidana yang sejenis seperti kejahatan dengan kejahatan atau sebaliknya. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang *concursum* merupakan dasar pengurangan atau peringanan pidana di Indonesia, terlebih-lebih jika terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concursum idealis* (Pasal 63 ayat 1 KUHP), maka hakim dengan ini dapat menjatuhkan satu jenis pidana saja, yakni hukuman pidana ang terberat.

Menurut Zainal Abidin, seserang yang menghilangkan nyawa orang lain menurut pasal 338 KUHP, mempunyai kesengajaan dalam tiga corak<sup>38</sup>:

- 1) *Dolus eventualis*, sebagai niat, sadar akan kepastian dan sadar akan kemungkinan.
- 2) *Dolus repentinus*, yaitu kesengajaan yang langsung terwujud dalam diri pelaku tindak pidana
- 3) *Dolus premeditatus*, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu, maka ia menjadi dasar pemberatan pidana, yaitu pembuat delik itu diancam dengan hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara palin lama 20 tahun.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.436.

Keadaan yang memperberat pelaku pembunuhan lainnya diatur dalam pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan delik lainnya dan dengan tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pembunuhan itu, atau lagi melindunginya dan kawannya dari pemidaan dengan mempertahankan barangnya secara melawan hukum, maka akan diberikan sanksi pidana paling lama dua puluh tahun atau penjara seumur hidup.

## 2. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers, bahwa sebagai dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut<sup>39</sup>:

- 1) Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- 2) Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan,
- 3) *Strafrechtlijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP).

Namun lebih lanjut, pada titel ketiga KUHP pada poin pertama dan kedua bukan merupakan dasar peringatan pidana yang sebenarnya. Perndapat Jonkers ini sesuai dengan pendapat Hazewinkel Suringa<sup>40</sup> yang menegaskan bahwa percobaan dan pembantuan tidak masuk sebagai dasar

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.439.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.439.

perinaganan suatu pidana, namun termasuk dalam perwujudan yang berdiri sendiri-sendiri.

Pada Pasal 45 KUHP juga memberikan dasar peringanan kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu: dengan mengembalikan kepada orang tua atau wali tanpa dijatuhi hukuman pidana, atau menyerahkan kepada pemerintah tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu. Sekalipun dijatuhi hukuman, pidana maksimum yang dapat hakim berikan diambil dari lama hukuman dikurangi sepertiganya.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang pengerjaan skripsi diperlukan data-data yang konkret sebagai bahan penulisan dan referensi dalam penulisannya. Penelitian perlu dilakukan pada suatu lokasi dengan tujuan mengumpulkan data tersebut. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar karena obyek kajian dari skripsi yang dituliskan merupakan putusan perkara pidana yang terjadi di Kota Makassar dan berasal dari direktori Pengadilan Negeri Makassar.

Selain daripada lokasi penulisan tersebut diatas, penulis juga banyak mencari bahan referensi penulisan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka, antara lain perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan perpustakaan lain dalam wilayah kota makassar.

## **B. Jenis Sumber Data**

### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara langsung dengan narasumber terkait dengan obyek kajian skripsi. Narasumber terkait yang dimaksudkan adalah Hakim yang memutus perkara pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dianggap menunjang kelengkapan data primer seperti hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, iteratur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, artikel, direktori putusan, serta perundang-undangan yang ada yang hubungannya dengan masalah yang diangkat.

- b. Metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu metode yang dilakukan dengan proses wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab kepada narasumber terkait dengan kebutuhan data primer skripsi ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

#### **D. Analisis Data**

Setelah semua data dari hasil penelitian yang berupa hasil wawancara dan data dari berbagai kepustakaan yang dibutuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya penulis akan melakukan analisis data terhadap data-data tersebut untuk menjawab pertanyaan dari skripsi yang disusun ini.

Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam skripsi ini data yang dibutuhkan bukan merupakan data yang bersifat kuantitatif atau data-data statistik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Pemerkosaan**

Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materiil pada perbarengan tindak pembunuhan disertai pemerkosaan dalam kasus putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

##### **1. Identitas Terdakwa**

Terdakwa bernama Asrul Eka Saputra, lahir di Pare-Pare pada tanggal 11 Mei 1995 saat berstatus Terdakwa berusia 19 tahun. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Bertempat tinggal di Jl. Emmy Saelan III No. 2 kota Makassar. Beragama Islam. Terdakwa bekerja di Istana Laundry.

##### **2. Posisi Kasus**

Bahwa Terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan saksi Korban Nur Halimah di Istana Laundry Jl. Emi Saelan III no. 2 Kota Makassar timbul rasa cinta dan simpati terhadap saksi Korban, atas perasaan tersebut Terdakwa kemudian mengutarakan perasaannya tetapi

tidak mendapatkan jawaban dari Korban. Malam sebelum kejadian pacar Korban dating ke Istana Laundry dan tepat didepan mata Terdakwa, Terdakwa melihat Korban berpelukan dan berciuman dengan pacar Korban. Setelah pacar Korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasihan dari Korban, Terdakwa lalu curhat dengan mengatakan bahwa rumah tangga orang tuanya tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, Korban kemudian mengatakan “kasihan betul hidup kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu hidup di dunia hancur sekali hidupmu”. Perkataan saksi Korban tersebut membuat Terdakwa merasa jengkel, pikirannya semakin kalut mengakibatkan timbulnya niat Terdakwa untuk menghabisi saksi Korban. Sebelum menghabisi saksi Korban, malam sebelum kejadian Terdakwa malam sebelum kejadian Terdakwa berusaha untuk masuk ke kamar Korban untuk tidur bersama dengan alasan diluar Terdakwa ketakutan, karena melihat perbuatan Terdakwa yang sudah tidak benar, Korban lalu berpura-pura lalu berkata kepada Terdakwa mau membeli sabun di Indomart. Setelah Korban berada di Indomart, Korban lalu menceritakan kepada saksi Hamka dan saksi Zulfikar bahwa ia ketakutan karena ada teman kerjanya yaitu Terdakwa Asrul yang mau masuk tidur bersama didalam kamarnya, sehingga Korban izin berpura-pura membeli sabun. Sekitar Pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengirimkan SMS Kepada Korban tetapi tidak dijawab oleh Korban sehingga pada saat itu Terdakwa mendatangi Korban di Indomart, pada saat bertemu Terdakwa

menyatakan, “kenapa lama sekali”, namun dijawab oleh Korban “sebentarpi saya pulang karena masih cerita-ceritaka”, atas penyampaian tersebut Terdakwa kembali ke rumah laundry, setelah lama menunggu Terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada Korban dan memintanya untuk dibelikan air mineral namun kembali tidak dibalas sehingga Terdakwa kembali ke Indomart membeli air mineral sambil mengajak Korban pulang kerumah tetapi Korban kembali beralasan dengan mengatakan “sebentarpi masih cerita-ceritaka”, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi Indomart untuk memanggil Korban pulang ke rumah laundry dengan mengatakan sudah subuh namun kembali Korban mengatakan hal yang sama sehingga pada saat itu Terdakwa meninggalkan Korban dan kembali ke ruko. Sekitar pukul 06.30 WITA Korban kembali ke ruko dan mencuci pakaian dikamar di lantai 2, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit datangf dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan ke Pare-pare. Setelah menerima uang itu, Terdakwa kemudian naik ke lantai II ruko dan melihat Korban sedang mencuci pakaian dalam kamar mandi, karena telah diselimuti oleh perasaan cemburu, emosi, dan jengkel kepada Korban, Terdakwa kemudian mengambil pisau dapur dilantai II itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang Terdakwa menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang kali, pada bagian paha serta leher yang mengakibatkan Terdakwa jatuh tersungkur dan meminta tolong, dalam

kedaaan terlentang Terdakwa kemudian menyetubuhi Korban dan setelah selesai Terdakwa kembali menusuk Korban beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara mengunci kamar mandi lalu kuncinya di simpan di laci meja laundry. Terdakwa kemudian melarikan diri ke Pare-Pare dan pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban dibuang ke laut.

### **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Membuat surat dakwaan merupakan tugas Jaksa selaku Penuntut Umum yang disusun dengan rangkaian antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi:

- a. surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah memuat inti isi dari surat dakwaan, ialah yang mengenai perbuatan-perbuatan, tempat

dan waktu tindak pidana itu dilakukan dan segala keadaan atau masalah yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan itu yang dapat memberatkan ataupun yang meringankan Terdakwa.<sup>41</sup>

Kasus perkara tindak pidana perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan dengan nomor perkara 78/PID.B/2014/PN.MKS yang dengan Terdakwa Asrul Eka Saputra oleh Jaksa M. Yusuf S.H., didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif. Dakwaan Jaksa Penuntut umum yakni sebagai berikut:

### **Kesatu**

#### **Primair**

Bahwa Terdakwa Asrul Eka Saputra pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya waktu lain dibulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emi Saelan III Kota Makassar atau setidaknya termasuk tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Nur Halimah.**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.**

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Asrul Eka Saputra pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya waktu lain dibulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emi Saelan III Kota Makassar atau setidaknya termasuk tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

---

<sup>41</sup> Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Penerbit Mandar Maju. Bandung. Hlm. 199



Makassar yang berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Nur Halimah.**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.**

**Lebih Subsidair**

Bahwa Terdakwa Asrul Eka Saputra pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya waktu lain dibulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emi Saelan III Kota Makassar atau setidaknya termasuk tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, **melaukan penganiayaan terhadap Nur Halimah yang mengakibatkan mati.**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

**Dan,**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Asrul Eka Saputra pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya waktu lain dibulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emi Saelan III Kota Makassar atau setidaknya termasuk tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, **dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Korban Nur Halimah bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP.**

Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, Pasal 340 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut.

**Ad.1) Unsur barang siapa**

Bahwa unsur barangsiapa menunjukkan subjek hukum yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah Asrul Eka Saputra bin H.Hamzah, Identitasnya telah diakui seperti diuraikan diatas dan sepanjang dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2). Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.**

Bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (risalah penjelasan Undang-undang), sengaja (dolus) berarti mengkhendaki mengetahui, pembuat harus mengkhendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dilakukannya.

Selanjutnya sengaja ada 3 tingkatan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, (1989:81) yaitu:

1. sengaja sebagai niat, akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
2. Sengaja kesadaran akan kepastian, yaitu ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan tersebut.
3. Sengaja insaf kemungkinan. Yaitu dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi hamka, Zulfikar, Wahyuni dan Terdakwa dipeoreh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 09 Oktober 2013 sekira jam 07.30 pagi bertempat di Ruko Jl. Emi Saelan III No. 2 Korban Nur Halima sedang bekerja di laundry di lantai II dalam kamar mandi, kemudian dating Terdakwa memeluk dari belakang dan langsung menusuk

Korban Nurhalima menggunakan Pisau secara berkali-kali pada bagian perut, dada, leher, bokong, dan paha;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Korban Nurhalima mengalami 16 (enam belas) luka tusuk, 2 buah luka iris pada bagian dada kanan dan pergelangan tangan kiri, 4 buah luka memar pada bagian kepala samping kanan dan kiri serta telinga kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Korban Nur Halima meninggal dunia (sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhawangara bertanggal 18 Oktober 2013 No.003-Mt/VER/X/2013/Rumkit);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan menusuk pisau pada bagian perut, dada, leher, bokong, paha, secara berkali-kali, dapat diartikan Terdakwa mengetahui akan mengakibatkan kematian pada Korban, karena itu unsur dengan sengaja pada delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja tersebut dilakukan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamka, Zulfikar, dan Wahyuni, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada malam kejadian sekira jam 01.45 Rabu 9 Oktober 2013 Terdakwa masuk ke kamar tidur Korban Nur Halima bermaksud akan tidur bersama Korban, untuk menghindari paksaan dari Terdakwa maka Korban pura-pura ingin membeli detergen untuk dipakai mencuci besok hari, Korban keluar dari kamar tidur pergi ke Indomaret berjarak kurang lebih 10 meter sebelah kiri ruko tempat Terdakwa dan Korban, setelah Korban masuk di Indomaret menceritakan keadaan yang dialaminya kepada saksi Hamka dan Zulfikar bahwa Terdakwa secara kasar dan masuk ke kamar tidur korban di lantai II, Korban merasa

keselamatan jiwanya terancam dan meminta agar diijinkan menumpang sementara di Indomaret;

- Bahwa setelah mendengar cerita Korban tersebut kemudian saksi Hamka dan Zulfikar selaku pegawai toko Indomaret memberikan ijin Korban untuk tidur di Indomaret namun Korban selalu gelisah mondar-mandir di dalam toko karena trauma akibat perbuatan Korban ;
- Bahwa tidak lama Korban berada dalam toko Indomaret kemudian dating Terdakwa mengajak pulang tetapi Korban menolak, dari jam 01.45 sampai 05.00 subuh Terdakwa tiga kali datang mengajak Korban pulang ke ruko tetapi selalu ditolak Korban karena Korban sudah merasa trauma terhadap kelakuan Terdakwa;
- Bahwa waktu pagi hari pukul 06.30 WITA Korban Nur Halima baru kembali ke ruko dan langsung kerja di laundry di kamar mandi lantai II, pada sekira jam 07.30 WITA Terdakwa melakukan aksinya menggunakan pisau langsung menusuk tubuh Korban pada bagian perut, dada, leher, bokong, paha dengan jumlah 16 tusukan, 2 irisan, pada tubuh Korban Nur Halima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis perbuatan Terdakwa mulai dari jam 01.00 malam sampai pada melakukan tindakan menusuk pisau secara berkali-kali tubuh Korban pada jam 07.30 pagi terlihat bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah terencana atau direncanakan sejak pada jam 01.00 WITA malam tanggal 09 Oktober 2013, hal itu semata-mata dilakukan Terdakwa hanya berdua dalam satu ruko pada malam tersebut dengan kondisi dan keadaan tersebut timbul nafsu birahi dalam benak dan pikiran Terdakwa yang tidak terkendali ingin menyetubuhi Korban;

Bahwa karena dalam pikiran Terdakwa dirasuki keinginan untuk menyetubuhi Korban sehingga mengambil jalan pintas membunuh Korban, pikiran Terdakwa tersebut terbaca oleh Korban pada 01.30 malam sehingga Korban pergi mengamankan diri di

Indomaret terletak disebelah kiri ruko tersebut (sebagaimana keterangan dari saksi Hamka dan Zulfikar karwyawan Indomaret, keduanya menerangkan Korban bercerita bahwa keselamatan jiwanya terancam oleh Terdakwa, dan keterangan saksi Yudit menerangkan pada jam 04.00 Korban Nurhalima sms saksi berbunyi keamanan jiwanya terancam, juga sms kepada saksi Wahyuni bahwa Korban merasa tidak aman berada di ruko sehingga mengamankan diri ke Indomaret);

Bahwa selain bukti tersebut diatas juga dapat dilihat pada waktu sekira jam 07.30 pagi ketika Korban Nur Halima datang dan langsung bekerja di Laundry kamar mandi lantai II Terdakwa dari belakang langsung menghujani tusukan pisau pada tubuh Terdakwa, setelah Korban Nurhalima lemas Terdakwa membuka celana Korban dan menyetubuhi, selesai menyetubuhi Korban Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengucninya dari luar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ruko menuju ke Parepare;

Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk pisau tubuh Korban secara berkali-kali (sebanya 16 tusukan dan 2 irisan) secara jelas Terdakwa berpikiran untuk membunuh korban hal mana pembunuhan tersebut telah dipikirka oleh Terdakwa sejak jam 01.45 malam;

Bahwa dari rentang waktu 01.45 malam sampai Terdakwa mewujudkan niatnya membunuh Korban dengan berkali-kali menusuk pisau pada tubuh Korban pada sekira jam 07.30 pagi terdapat waktu yang cukup untuk berpikir mewujudkan niatnya tersebut;

Bahwa memang motivasi Terdakwa membunuh Korban karena ingin menyetubuhi Korban karena ingin menyetubuhi Korban namun untuk mewujudkan keinginan tersebut Terdakwa secara sadar dalam waktu yang cukup merencanakan membunuh Korban seperti yang diuraikan diatas, dari rentang waktu tersebut juga Terdakwa dapat berpikir seperti yang diuraikan diatas, dari rentang waktu tersebut juga Terdakwa dapat berpikir untuk membatalkan niatnya untuk membunuh Korban namun ternyata Terdakwa memilih untuk membunuh Korban;

Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi;

**Ad.3). Unsur menghilangkan jiwa orang lain, yaitu timbul dari akibat adanya perbuatan pelaku akibat tersebut berupa meninggalnya orang disebabkan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;**

Bahwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 18 Oktober 2014 No. 003 MT/VER/X/2013, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Mansyur, Yudith Dwi Wiken, pada rabu tanggal 09 Oktober 2013 sore melihat Korban Nurhalima dengan banyak luka tusukan dan bersimbah darah serta sudah meninggal dunia tergeletak dalam kamar mandi lantai II ruko laundry milik saksi tersebut, begitu juga saksi Dumbang, Sakkari (masing-masing orang tua dan kakak Korban) keduanya melihat mayat Korban dengan banyak luka;

Bahwa keterangan Hamka dan saksi Zulfikar keduanya kawryawan Indomaret dekat ruko tempat Korban bekerja menerangkan pada malam sebelum kejadian datang Korban minta ijin numpang mengamankan diri dengan alasan keselamatan jiwa Korban terancam karena diganggu oleh Terdakwa, demikian pula keterangan saksi Wahyuni menerangkan bahwa pada malam sebelum kejadian pembunuhan saksi sms dengan Korban dari jam 01.00 malam sampai jam 05.00 subuh Korban menyampaikan sedang terancam jiwanya karena diganggu oleh Terdakwa.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta kematian Korban Nurhalima adalah akibat perbuatan Terdakwa, hal mana Terdakwa juga mengakui dan membenarkan perbuatannya seperti yang diuraikan dalam Visum et Repertum ;

Bahwa dengan demikian unsur “mengilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain:, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu primair ;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua Pasal, 285 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa.
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perikahan.

**Ad.1). Unsur “barang siapa”**

Unsur barang siapa sudah diuraikan pada pertimbangan dakwaan kesatu primair diatas karena secara mutatis mutandis pertimbangan pada dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan pada dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2). Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.**

Bahwa yang dimaksud melakukan kekrasan sesuai ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa sesuai visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Makassar tanggal 18 Oktober 2014 No.003 MT/MT/VER/X/2013, hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Nur Halima yaitu: ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa beberapa luka intravital (luka-luka dalam keadaan Korban masih hidup) yaitu:

- a. 4 buah luka memar pada samping kepala kanan, dahi kiri, pipi kanan, dan telinga kiri akibat kekerasan tumpul.
- b. 1 buah luka lecet pada pipi kiri akibat gesekan tumpul.
- c. 2 buah luka iris pada dada kanan dan pergelangan tangan kiri akibat irisan benda tajam.
- d. 16 buah luka tusuk pada leher, dada kiri, perut bagian pusat, perut bagian tengah, perut kiri, punggung atas

kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, paha kanan, paha kiri.

Bahwa dari bukti-bukti perbuatan tersebut *cukup jelas terlihat bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Nurhalima.*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

**Ad.3). Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.**

Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan Terdakwa karena kehendak menyetubuhi Korban;

Bahwa selanjutnya dalam Visum et Repertum diterangkan “ditemukan tanda-tanda persetubuhan pada waktu saat Korban masih hidup yaitu adanya luka lecet pada permukaan selaput dara dan luka lecet pada liang senggama” demikian pula saksi Yudit melihat sperma di pinggir kemaluan dan paha Korban Nurhalima ketika Korban sudah meninggal dan tergeletak didalam kamar mandi;

Bahwa Terdakwa juga mengakui dan membenarkan menyetubuhi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma ;

Bahwa keterangan saksi Dumbang (orang tua Korban) dan saksi Sakkari (kakak kandung Korban) keduanya menerangkan Korban masih gadis belum pernah menikah;

Bahwa semua bukti-bukti tersebut maka unsur: memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan, telah terpenuhi

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.

**4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Surat tuntutan ini berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan *Requisitor* adalah surat yang memuat



pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah disanggah oleh Terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar.

Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS. dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-14/MKS/EP/01//2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H.Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. Satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 25 cm;
  - 3.2. Satu lembar baju;
  - 3.3. Satu lembar celana panjang;
  - 3.4. Satu lembar celana dalam;

3.5. Satu lembar BH;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

## 5. Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan ahir. dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili:

1. Menyatakan: Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin H.HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin. H.HAMZAH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **“Seumur Hidup”**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25cm
  - 1 (Satu) lembar baju
  - 1 (Satu) lembar celana panjang

- 1 (Satu) lembar celana dalam
  - 1 (Satu) lembar BH
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 6. Analisa Penulis

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu:

### Kesatu

**Primair** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Subsida** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Lebih Subsida** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Kedua

: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan dakwaan kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang masing-masing dari dakwaan tersebut

berdiri sendiri, apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut. Sebaliknya, apabila terbukti Terdakwa dapat didakwakan dengan semua dakwaan yang ditujukan penuntut umum.

Selain itu pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum menggunakan dakwaan dengan sistem subsidair. Dalam sistem ini apabila dalam pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa terbukti melakukan salah satu dari tindak pidana sesuai yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, atau Kesatu Lebih Subsidair, maka dakwaan lain tidak akan dipertimbangkan lagi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan harus dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut.

Menurut penulis, penerapan hukum materiil didalam kasus ini sudah tepat, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan Kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP serta Pasal 285 KUHP dengan metode penjatuhan sanksi *Concursus Realis* sesuai dengan aturan Pasal 67 KUHP. Kemudian, apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1. Unsur dalam Pasal 340 KUHP, antara lain

- a. Unsur barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
- c. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Pengertian dari barang siapa dalam hal ini menunjukkan subjek hukum dari dakwaan yang ditujukan. Subjek hukum ini yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa. Terdakwa dalam hal ini adalah Asrul Eka Saputra Bin H.Hamzah yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa itu sendiri.

Pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (risalah penjelasan Undang-undang), sengaja (dolus) berarti mengkhendaki mengetahui, pembuat harus mengkhendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dilakukannya. Rangkaian perbuatan Terdakwa dengan mengambil pisau dan menusuk pisau tersebut pada bagian vital secara berkali-kali dapat diartikan bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian kepada Korban.

Sedangkan, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu terjadi karena adanya tenggang waktu antara kehendak (niat) dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana. Jika dilihat dalam posisi kasus dan keterangan dari saksi bahwa perilaku

Terdakwa yang berkali-kali datang memanggil Korban di Indomaret untuk pulang ke ruko laundry mulai dari pukul 01.00 hingga 06.30 WITA serta adanya keterangan dari Korban bahwa merasa terancam dengan perilaku Terdakwa menunjukkan adanya indikasi terencana terlebih dahulu karena tujuan dari Terdakwa yang sudah ingin dilaksanakan sejak pukul 01.00 WITA namun tertunda karena kesadaran dari Korban terhadap perilaku Terdakwa.

Pengertian dari unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang tidak dikehendaki undang-undang yang karena perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi yang menemukan jasad Korban dan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh fakta bahwa kematian Korban adalah hasil dari perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa juga mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut.

## 2. Unsur Pasal 285 KUHP.

Gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, adalah;

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

c. Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dan mencocoki unsur delik dalam Pasal 285 KUHP, dimana Terdakwa sebagai unsur objek melakukan persetubuhan dengan Korban yang bukan dalam tali pernikahannya dan dilakukan dengan kekerasan.

Menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan keduanya terbukti didalam persidangan dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari *Concursus Realis* sesuai yang diatur dalam Pasal 65 KUHP dimana apabila terbukti maka akan dijatuhi sanksi dengan sistem penjatuhan sanksi *absorpsi yang diperberat*, dimana sistem penjatuhan sanksi *concursus* dalam kasus ini hanya dijatuhkan satu sanksi pidana saja.

Sanksi yang diberikan apabila dalam tataran kuantitatif maka maksimum pidana yang dijatuhkan adalah 15 tahun + 1/3 dari 15 tahun, melihat kedua kejahatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejenis. Namun penjatuhan sanksi yang diberikan adalah pidana penjara seumur hidup maka sesuai dengan Pasal 67 KUHP penghitungan sanksi secara kuantitatif secara otomatis tidak berlaku lagi, karena Terdakwa oleh Hakim dijatuhkan sanksi yang paling berat diantara kedua tindak pidana tersebut, yakni pidana penjara seumur hidup

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pemerkosaan disertai dengan Pembunuhan Berencana.**

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Apabila proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan saksi kepada Terdakwa. Untuk itu hakim dituntut untuk melakukan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan Terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:



1. Menyatakan: Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin H.HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin. H.HAMZAH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **“Seumur Hidup”**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25cm
  - 1 (Satu) lembar baju
  - 1 (Satu) lembar celana panjang
  - 1 (Satu) lembar celana dalam
  - 1 (Satu) lembar BH
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam aspek normative, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara tersebut adalah:

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua, hal mana sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan, karena itu Terdakwa harus dihukum; Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup, hemat majelis Hakim dengan mempertimbangkan memperhatikan aspek normative (norma hukum pidana yang dilanggar Terdakwa) yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan putusan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana : pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, begitupula dari aspek sosiologis dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan reaksi kemarahan luar biasa dari masyarakat utamanya dari elemen kampus Universitas Negeri Makassar, mahasiswa melakukan demonstrasi

pada setiap digelar persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Korban Nurhalima adalah seorang Mahasiswi program S2 Universitas Negeri Makassar yang sedang berjuang menempuh pendidikan formal dengan mencari biaya kuliah dan biaya hidup di Kota Makassar dengan bekerja menjadi tukangng cuci di Ruko Jl. Emi Saelan II Makassar, Korban Nurhalima tidak membebani orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani. Dalam kesehariannya, pekerjaan halal yang dikerjakan oleh Korban justru dinodai dan tidak dilindungi oleh Terdakwa karena pada saat Korban bekerja seorang diri di laundry, Terdakwa melakukan perbuatan keji membunuh dan memperkosa Korban, karena itu tuntutan pidana seumur hidup dinilai patut dan adil; Bahwa majelis hakim juga tetap memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena perbuatan Terdakwa melampaui batas perikemanusiaan maka hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dictum putusan dibawah ini dipandang sudah adil

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain
- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga Korban.

## **2. Analisa Penulis**

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya Terdakwa. Hal ini didasarkan adanya keterkaitan antara keterangan para saksi, Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saat pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar

menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan”.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim Harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini mencakupi bukti-bukti, keteangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun sisi psikologis Terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Selain daripada aspek normative tersebut diatas, dari hasil wawancara dengan Hakim Ketua, Suparman Nyompa, S.H., yang memutus perkara tersebut, beliau membenarkan mengenai isi dari putusan tersebut. Menurutnya penjatuhan sanksi pidana mengenai pembunuhan berencana sebagai dakwaan Kesatu Primair sudah tepat karena perbuatan tersebut dari keterangan saksi dan Terdakwa dapat ditemukan indikasi rencana terlebih dahulu karena adanya tenggang waktu yang cukup lama antara niat dan perbuatan tersebut dilakukan.

Lanjutnya, penjatuhan sanksi seumur hidup diberikan setelah menimbang aspek sosiologis dimana Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi pidana mati kepada Terdakwa karena Hakim Ketua menilai

perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sadistic dan tidak berperikemanusiaan terhadap Korban yang mempunyai niat baik untuk mencari nafkah halal dalam membiayai pendidikan dan kehidupannya. Namun melihat usia Terdakwa yang relative masih muda, bersikap kooperatif dalam persidangann, dan keluarga Terdakwa yang membantu prosesi pemakaman dari Korban maka dalam hal ini Hakim Ketua menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup dan mengurungkan niat untuk menjatuhkan sanksi pidana mati kepada Terdakwa.

Penulis dalam hal ini juga sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh Hakim, melihat bukti dari Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar No.003 MT/VER/X/2013 bahwa jumlah tusukan dan kekerasan benda tumpul yang begitu banyak pada daerah vital dan berdampak cepat terhadap kematian sehingga pembunuhan berencana ini terlihat sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Jika ditinjau dari niat pelaku, dalam posisi kasus ada rentang waktu yang cukup lama antara pukul 01.00 WITA hingga pukul 06.30 yang seharusnya digunakan pelaku untuk mempertimbangkan efek yang akan timbul jika melancarkan niatnya tersebut. Akan tetapi waktu tersebut justru digunakan untuk terus memanggil Korban untuk kembali ke Ruko, artinya niat dari pelaku ini sudah terencana sejak awal namun terkendala dan baru bisa dilaksanakan di pagi hari sekitar pukul 07.30 WITA.

Ditambah sebelum melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut, ada indikasi melarikan diri dari pelaku karena pelaku terlebih dahulu meminjam uang kepada saksi Yudith yang dari keterangan saksi akan digunakan untuk pulang kembali ke Pare-pare.

Maka dari itu penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup yang diberikan oleh Hakim kepada Terdakwa sudah tepat menurut penulis karena apabila dianalisis dari posisi kasus, alat bukti, dan keterangan saksi jelas bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadistic karena menusuk Korban hingga berkali-kali, kemudian masih dalam keadaan hidup Terdakwa memperkosa korban yang dalam keadaan kesakitan dan tidak berdaya, dan membunuhnya sebelum mengunci kamar mandi ruko dan kemudian melarikan diri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa yang di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental dan tidak ada alasan pemaaf sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penjatuhan sanksi dengan menerapkan metode *concursum realis* sesuai dengan pasal 67 KUHP mengenai pidana penjara seumur hidup juga telah sesuai.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yaitu, dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan

dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana seumur hidup juga dinilai telah tepat jika dilihat dari perbuatan pelaku yang bersifat sadistic dan latar belakang korban dalam menjalani hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Andi Zainal, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J. van. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adam. 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hamzah, Andi,. 2011. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sindar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana. Mahakarya*. Yogyakarta: Rangkang Offset.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Kanter E.Y. dan S.R, Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PIHM, Jakarta.



- Lamintang, P.A.F, dan Ineo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: P I. Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: P I. Bumi Aksara.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam penanggulangan Kejahatan kekerasan, Medan*: Penerbit Pustaka Bangsa.
- Prodjokoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT, Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.